

Investment



PRAKTIK KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAE

P. Agung Pambudhi – Ketua KPPOD



GAMBARAN PENERIMAAN DAERAH

Dari komposisi pendapatan, dapat dilihat rasio ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Rasio ini ditunjukkan oleh persentase transfer ke daerah (termasuk didalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Semakin tinggi rasio, semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat.

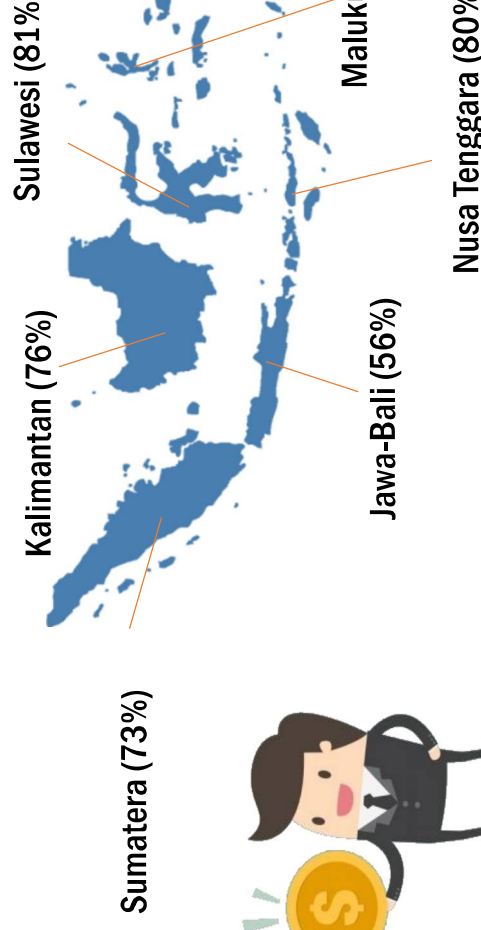


Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana perimbangan

Persentase PAD Kab/Kota di atas 40%



Alokasi Dana Perimbangan berdasarkan Pulau (2016)





INSTRUMEN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH

D KATADATA

MAKRO

Darmin Minta Pemda Beri Insentif Pajak untuk Tarik Investasi

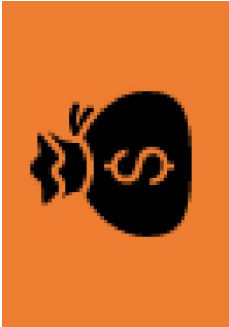
"Akan keren kalau ada pemda yang berani mengatakan 'kalau investasi di bidang ini masuk, paling tidak Rp 1-3 triliun, kami bebaskan PBB-nya atau beri (insentif) fiskal PBB-nya.'"



Instrumen berkompetisi & membangun iklim usaha

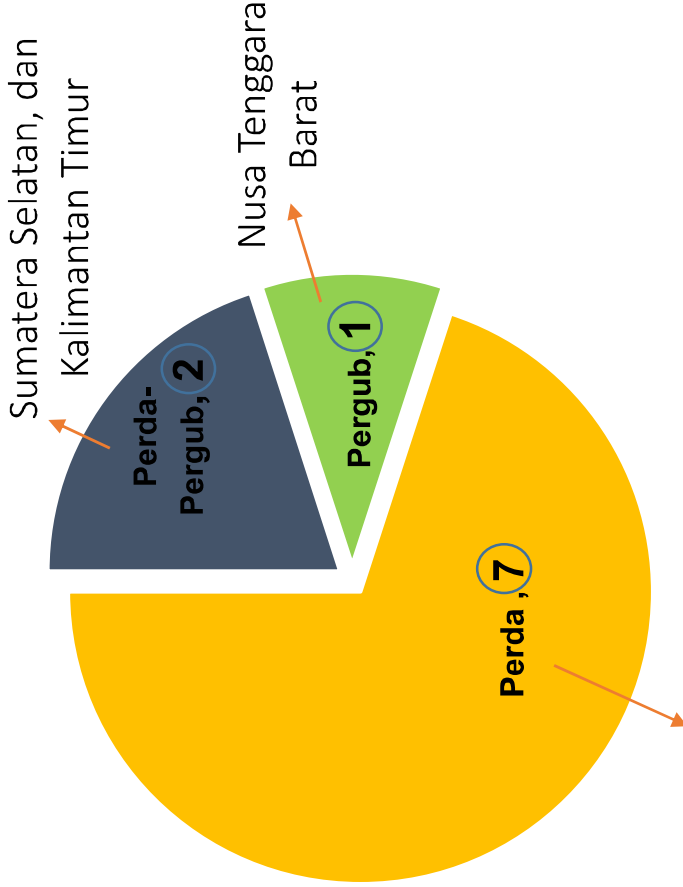
Isu investasi daerah saat ini tak bisa sebatas upaya *debottlenecking* (deregulasi, debirokratisasi) harus bisa menawarkan nilai lebih (jasa, fasilitas & insentif), berbasis kpd kebutuhan/permin dari pelaku usaha, dan unggul (kompetitif) dibanding daerah lain.





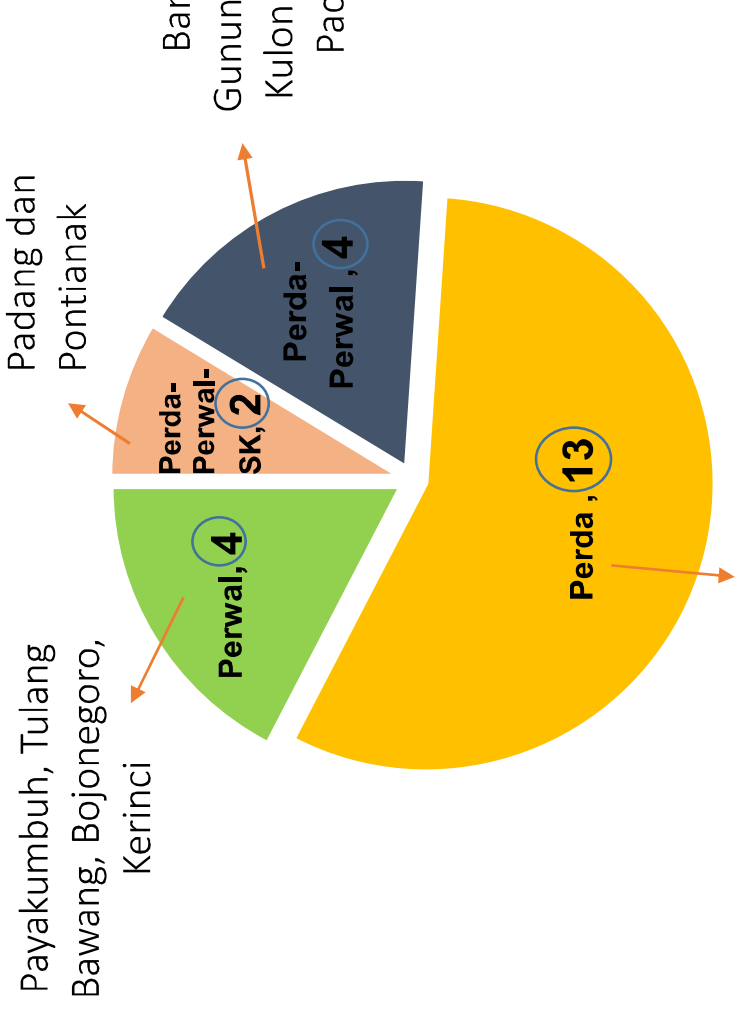
KEBIJAKAN INSENTIF DI DAERAH

Ada 10 pemerintah provinsi yang mengatur tentang insentif investasi



Bali, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah

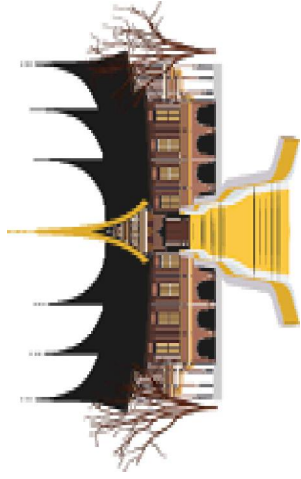
Ada 33 pemerintah Kab/Kota yang mengatur tentang insentif investasi



Balikpapan, Buton, Aceh Timur, Pidie, Kendal, Tasikmalaya, Tabalong, Mojokerto, Kolaka, Maros, Konawe Selatan, Gorontalo



PRAKTIK INSENTIF INVESTASI DI DAERAH



KOTA PADANG



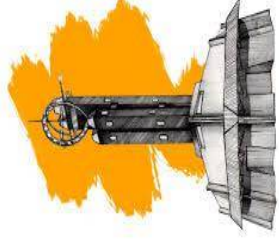
Terjadinya bencana alam
(gempa tahun 2009)



Lemahnya kondisi ekonomi
regional



Kerusakan infrastruktur dan
meningkatnya jumlah
pengangguran



KOTA PONTIANAK



Turunnya pertumbuhan
ekonomi



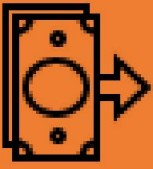
Penyerapan tenaga kerja
yang rendah



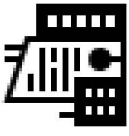
Lesunya investasi daerah



Banyaknya keluhan dari
masyarakat tentang
mahalnya biaya retribusi
perizinan



KRITERIA INSENTIF



PONTIANAK

Kriteria pemberian **keringanan retribusi** mengacu kepada salah satu kriteria yang terdapat dalam PP 45/2008.

Pengurangan retribusi:

Pemberian pengurangan retribusi IMB diberikan untuk seluruh fungsi bangunan

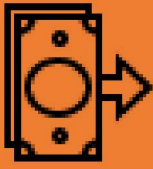
Pembebasan retribusi (memenuhi salah satu kriteria):

- Bangunan milik pemerintah
- Bangunan milik pemda
- Keadaan memaksa (force majeure)
- Melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan
- Masyarakat berpenghasilan rendah



PADANG

- Kelas A: 1 triliun atau lebih, atau tenaga kerja 500 orang
- Kelas B: lebih dari 500 milyar - 1 triliun, atau tenaga kerja 500 orang;
- Kelas C: 100 milyar- 500 milyar atau tenaga lebih dari 100 orang;
- Kelas D: lebih dari 50 milyar-100 milyar, atau tenaga kerja 100-500 orang
- Kelas E: 1 milyar-50 milyar, atau tenaga kerja 10-50 orang



BENTUK INSENTIF



PONTIANAK

Pengurangan retribusi:

- Jumlah ketetapan retribusi IMB > 100juta pengurangan sebesar 70% dan paling rendah 70juta
- Jumlah ketetapan retribusi IMB sampai dengan 100juta, pengurangan sebesar 35% dan paling rendah 1juta

Pembebasan retribusi:

Untuk bangunan yang memenuhi kriteria pembebasan diberikan pengurangan setinggi-tingginya 100% dari jumlah retribusi terutang

Masa Berlaku:

Tidak ada masa berlaku



PADANG

Insentif Pajak dan Retribusi:

Kelas A: 100%; Kelas B: 80%; Kelas C: 60%; Kelas D: 40%; 20%

Kemudahan penanaman modal dalam percepatan pengurusan

- Kelas A: 50%
- Kelas B: 40%
- Kelas C: 30%
- Kelas D: 20%
- Kelas E: 10%

Masa Berlaku:

Pemberian insentif selama 2 tahun dan pemberian kemudahan berusaha selama 1 tahun (pada tahun pertama) sejak ditelepon keputusan.



OUTPUT KEBIJAKAN INSENTIF DI PADANG

2009-2017

SK No. 50/2013

Shopping center, ballroom, meeting room, hotel dan fasilitas lainnya

- PT. Surya Persada Lestari (NILAI INVESTASI- 1T dan tenaga kerja lokal ±500 org). Pengurangan pajak dan retribusi 100% (2 tahun) dan pemberian kemudahan (1 tahun)

SK No. 91/2013

Shopping center, ballroom, meeting room, hotel dan fasilitas lainnya

- PT. Graha Jakarta Utama (NILAI INVESTASI Rp 1 T dan tenaker lokal ±500 org. Pengurangan pajak dan retribusi 100% (2 tahun) dan pemberian kemudahan (1 tahun)

SK No. 130/2013

Pasar tradisional dan pasar modern Simpang Haru

- PT. Adiwira Ikaputra (NILAI INVESTASI Rp 155.499.180.000 dan tenaker lokal ±50 orang. Pengurangan pajak dan retribusi 60% (2 tahun) dan pemberian kemudahan (1 tahun)

SK No. 290/2015

Mall dan hotel

- PT. Surya Persada Lestari (NILAI INVESTASI- Rp 793.064.039,400. Pengurangan pajak dan retribusi 80% (2 tahun) dan pemberian kemudahan (1 tahun)

SK No. 105/2016

Pusat perbelanjaan

- PT. TRANS RITEL PROPERTI (NILAI INVESTASI Rp 226.755.157.000 dan tenaker lokal 600 prg. Pengurangan pajak dan retribusi 60% (2 tahun) dan pemberian kemudahan (1 tahun)

Dampak Pemberian Insentif di K

Persentase PAD Kota Padang Terhadap Total Pendapatan



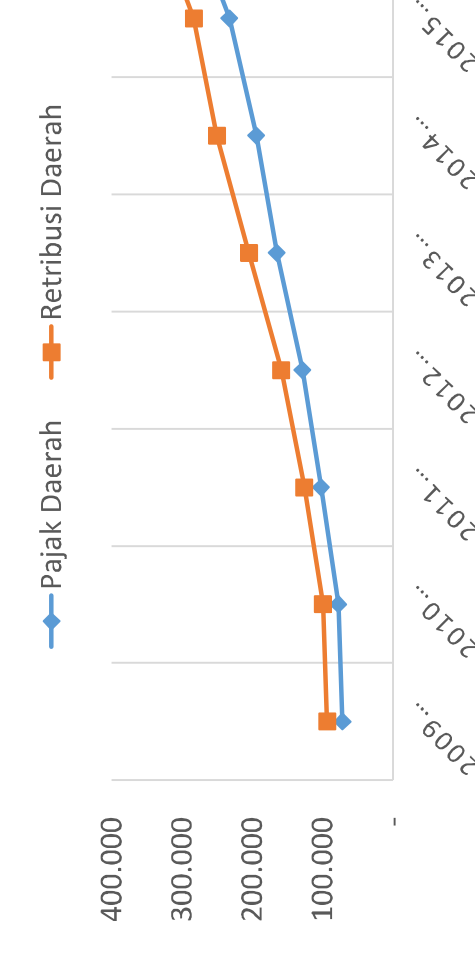
Realisasi Investasi Kota Padang



Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka



Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Padang dan DJPK Kemenkeu



OUTPUT KEBIJAKAN INSENTIF DI PONTIANAK



**Periode 1 Januari - 12
September 2016**

Berdasarkan SK Walikota Pontianak, pengurangan/
pembebasan Retribusi IMB diberikan kepada 37 permohonan
dengan pengurangan rata-rata sebesar 82.53% (Rp
256.218.650) dari jumlah ketetapan sebesar Rp 310.470.750,-



**Periode
13 September 2016**

Pemberian pengurangan secara otomatis kepada semua permohonan/
ketentuan ketetapan akhir setelah mendapatkan pengurangan serendah
1.000.000.

Berikut rinciannya:

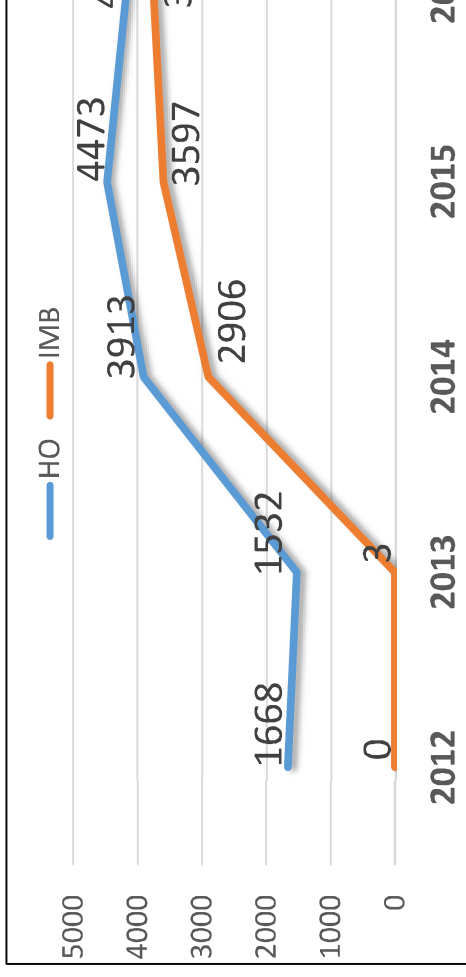
- IMB Asli/Tetap sebanyak 69 Pemohon dengan pengurangan rata-
66.20% (Rp.1.783.984.500) dari jumlah ketetapan Rp.2.694.899.000
- IMB Penertiban sebanyak 195 permohonan dengan pengurangan
sebesar 53.84% (Rp.1.256.314.700) dari jumlah ketetapan Rp.2.332.000.000
- IMB pendahuluan sebanyak 96 permohonan dengan pengurangan
retribusi sebesar 46,35% (Rp.1,061,632,700) dari jumlah keteta-
Rp,2,290,698,600

Dampak Pembe

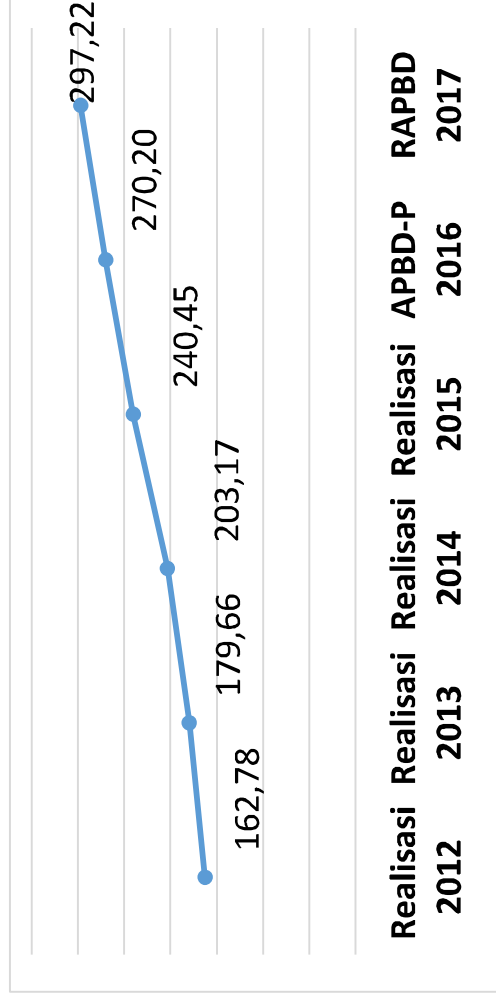
Persentase PAD Kota Pontianak Terhadap Total Pendapatan



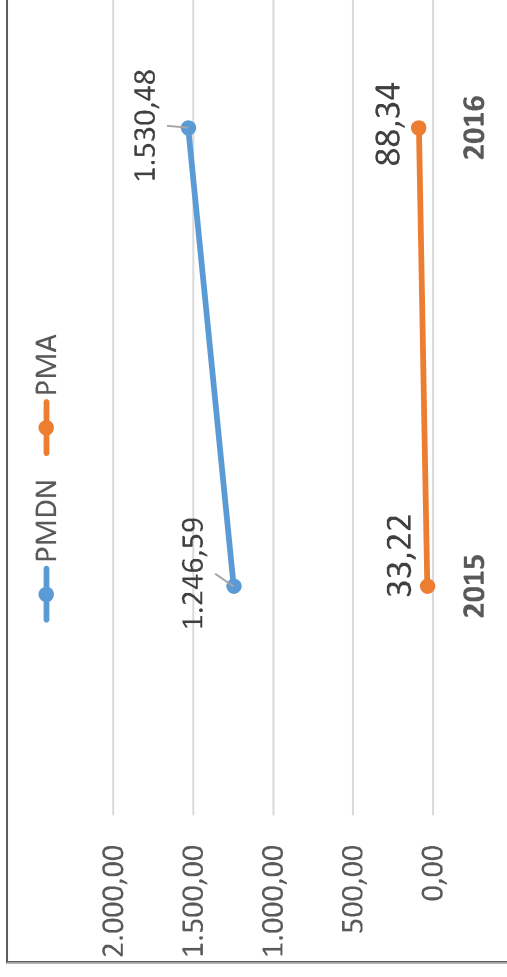
Perkembangan Surat Izin Yang diterbitkan Kota Pontianak



Perkembangan Pajak Daerah 2012 – 2017 Kota Pontianak
(dalam Rp. Milyar)



Realisasi Investasi Kota Pontianak (milyar rupiah)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pontianak



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN INSENTIF INVESTASI



FAKTOR PENDUKUNG

- Komitmen Kepala Daerah dan Pemahaman OPD dan DPRD terhadap pentingnya investasi daerah jangka panjang
- Ketersediaan regulasi yang rinci dan memuat tentang kriteria, mekanisme dalam mendapatkan insentif fiskal dan kemudahan berusaha
- Kepercayaan pemda terhadap wajib pajak, masyarakat dan pelaku usaha
- Penyediaan infrastruktur penunjang pelaku usaha
- Pontianak: Deregulasi: dari 140 jenis izin telah disederhanakan menjadi 20 jenis izin.
- Birokratisasi: pengurangan prosedur dan percepatan proses perizinan.



FAKTOR PENGHAMBAT

- Belum ada benchmark daerah untuk praktek kemudahan berusaha di daerah
- Belum ada dukungan Pemkot kepada pelaku usaha pasca pemberian insentif
- Ancaman kriminalisasi kebijakan atas insentif yang pernah diberikan (dari jaksa maupun KPK)
- Sosialisasi insentif fiskal dan kemudahan berusaha belum merata
- Padang: Pemda masih belum pro aktif untuk memberikan informasi mengenai insentif



**Permata Kuningan, 10th floor
Jl. Kuningan Mulia 9C Guntur Setiabudi
Jakarta 12980**

Phone : 62-21-8378 0642/53
Fax : 62-21-8378 0643
Home Page : [Http://www.kppod.org](http://www.kppod.org)
E-mail : kppod@kppod.org